



Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pariwisata di Era Pasca-Pandemi di Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia

¹Amalia Arifah, ²Novel Stefly Assa, ³Jakub Saddam Akbar

^{1,2}, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

³ Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumihan, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

Abstrak

Received: 11 Mei 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

This article examines the role of local government in supporting tourism development in the post-pandemic era in Minahasa and North Minahasa Regencies, North Sulawesi, Indonesia. The COVID-19 pandemic has significantly impacted the tourism sector in this region, reducing tourist visits and hindering economic activities dependent on the tourism industry. Using a qualitative approach with a case study design, this research analyzes how local governments perform their functions as primary drivers, facilitators, and regulators in tourism recovery. The findings reveal five main themes: (1) local government as the primary driver of tourism development; (2) infrastructure development as the foundation for recovery; (3) policy and regulation as a supporting framework; (4) pentahelix collaboration and partnerships as an acceleration strategy; and (5) sustainability and cultural preservation as development principles. This research concludes that post-pandemic tourism recovery in Minahasa requires strong synergy between local government policies, infrastructure investment, digital marketing, financial regulatory intervention, and local community empowerment to achieve sustainable and inclusive recovery.

Kata Kunci: local government, tourism, post-pandemic, Minahasa, sustainability

(*) Corresponding Author: ¹amaliaarifah@unima.ac.id, ²novelassa@unima.ac.id, ³jakubakbar@unima.ac.id

How to Cite: Arifah, A., Assa, N., & Akbar, J. (2026). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pariwisata di Era Pasca-Pandemi di Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.A), 134-143. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14335>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, termasuk bagi Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini memiliki kekayaan daya tarik wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, religi, hingga health tourism yang baru saja dikembangkan. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah menghantam sektor ini secara dahsyat, menurunkan jumlah kunjungan wisatawan secara drastis dan menghambat seluruh aktivitas ekonomi yang bergantung pada pariwisata. Sarjono et al. (2023) mencatat bahwa industri pariwisata di kawasan Pineleng, Minahasa, menghadapi tantangan bertahan hidup yang luar biasa selama pandemi, sehingga diperlukan strategi defensif dan adaptif untuk bangkit kembali. Pemerintah daerah pun menghadapi tantangan besar dalam memulihkan sektor yang vital ini.

Sebagai wilayah yang memiliki destinasi super prioritas nasional, yaitu Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, peran pemerintah daerah menjadi semakin



krusial dalam mendorong pemulihan pariwisata pasca-pandemi. Likupang diposisikan sebagai kawasan wisata super prioritas yang memerlukan dukungan lintas sektor untuk dapat berkembang secara optimal (Patadjenu et al., 2023). Lintong (2022) dalam dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARKAB) Minahasa Utara 2021–2025 memformulasikan visi, kebijakan, dan strategi pengembangan pariwisata daerah yang menjadi landasan perencanaan pemulihan pasca-pandemi. Dokumen ini menyediakan kerangka program indikatif yang dapat dijadikan acuan dalam analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah di sektor pariwisata.

Dalam konteks pasca-pandemi, pemerintah daerah menghadapi tantangan multidimensi yang meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya promosi digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (Siwij et al., 2023; Sumakul et al., 2021). Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara misalnya, masih dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, anggaran, promosi, dan sarana prasarana yang belum memadai (Sumakul et al., 2021). Analisis strategis menunjukkan bahwa kelemahan destinasi Minahasa masih berada pada aspek promosi, layanan, dan pengelolaan (Patadjenu et al., 2023). Artiari et al. (2025) memberikan bukti empiris bahwa pemasaran digital melalui Instagram oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan domestik ke Likupang, sehingga strategi pemulihan berbasis digital menjadi semakin relevan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif agar pemulihan pariwisata dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata di era pasca-pandemi di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji: (1) peran pemerintah daerah sebagai penggerak utama pengembangan pariwisata; (2) strategi pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata; (3) kebijakan dan regulasi yang mendukung pemulihan pariwisata; (4) pola kolaborasi penta-helix dalam pengembangan destinasi; serta (5) upaya menjaga keberlanjutan wisata dan pelestarian budaya lokal. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang bagaimana pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur dapat mengoptimalkan perannya dalam memulihkan dan mengembangkan sektor pariwisata pasca-pandemi (Dempo & Tulung, 2025).

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pariwisata di Minahasa telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti. Patadjenu et al. (2023) mengkaji tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata di Likupang dan menemukan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam pengembangan destinasi unggulan. Siwij et al. (2023) mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata di Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dan menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur, fasilitas, koordinasi, promosi, dan perlindungan wisatawan. Sumakul et al. (2021) menganalisis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, termasuk keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Sarjono et al. (2023) mengkaji strategi defensif industri pariwisata di Pineleng, Minahasa, selama pandemi dan menawarkan rekomendasi adaptif untuk pemulihan. Sari et al. (2022) menguraikan peran strategis pemerintah dalam memfasilitasi kolaborasi

penta-helix untuk pengembangan desa wisata pasca-pandemi. Santika et al. (2023) mengidentifikasi masalah dan tantangan desa wisata pasca pandemi yang relevan bagi perumusan intervensi pemerintah daerah. Wikarsa et al. (2024) memetakan lokasi strategis untuk UMKM kuliner di Kota Tomohon dan menyoroti peran penetapan hub bisnis oleh pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi berbasis pariwisata pasca-pandemi. Tangkere (2024) membahas digitalisasi sebagai strategi daya saing kuliner Minahasa dan menekankan peran kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat keberlanjutan serta perluasan pasar pasca-pandemi. Dalam konteks promosi, Lontoh et al. (2020) dan Tahir et al. (2021) menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial dan strategi promosi digital dalam pengembangan pemasaran wisata di Sulawesi Utara, sementara Artiari et al. (2025) membuktikan dampak pemasaran digital Instagram terhadap kunjungan domestik di Likupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran pemerintah daerah dalam mendukung pariwisata di era pasca-pandemi di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, yaitu memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiahnya. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam dalam batas-batas tertentu, baik yang berkaitan dengan individu, kelompok, lembaga, maupun komunitas. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus memungkinkan analisis yang detail tentang mekanisme, proses, dan dinamika peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pasca-pandemi di wilayah Minahasa dan Minahasa Utara, dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial, budaya, dan politik lokal yang spesifik.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Pariwisata, kepala desa di kawasan wisata, pelaku usaha pariwisata, dan tokoh masyarakat lokal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap topik yang muncul selama proses wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi kebijakan pemerintah daerah, peraturan daerah terkait pariwisata, dokumen perencanaan pembangunan termasuk RIPPARKAB Minahasa Utara 2021–2025 (Lintong, 2022), laporan kinerja dinas pariwisata, serta data statistik kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui empat tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi data melibatkan penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks tematik, jaringan kategori, dan narasi deskriptif yang memfasilitasi penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check untuk memastikan keabsahan temuan penelitian. Kerangka analisis penta-helix (Sari et

al., 2022) digunakan untuk menilai kolaborasi pemangku kepentingan dan peran pemerintah dalam fasilitasi serta regulasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema-tema utama yang muncul dari data, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kerangka teori dan temuan penelitian sebelumnya (Patadjenu et al., 2023; Siwij et al., 2023; Sumakul et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah sebagai Penggerak Utama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran sentral sebagai penggerak utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Peran ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perencanaan dan perumusan kebijakan pariwisata, pengalokasian anggaran, hingga implementasi program-program pengembangan destinasi. Pemerintah daerah menjadi aktor yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menginisiasi perubahan dan mendorong transformasi sektor pariwisata, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Sebagaimana ditegaskan oleh Siwij et al. (2023), peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyediakan infrastruktur, fasilitas, koordinasi, promosi, dan perlindungan wisatawan. Sarjono et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kawasan wisata Pineleng di Minahasa memerlukan dukungan aktif pemerintah lokal dalam hal fasilitas dan kebijakan untuk bangkit dari dampak pandemi, menegaskan bahwa strategi defensif dan adaptif harus dilandasi inisiatif pemerintah daerah.

Dalam konteks pemulihan pasca-pandemi, peran pemerintah daerah sebagai penggerak menjadi semakin kritis. Pemerintah daerah harus mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pemulihan yang komprehensif, mencakup peningkatan fasilitas dasar seperti akses jalan dan konektivitas internet (Sumakul et al., 2021), penguatan promosi destinasi melalui media sosial dan website resmi (Lontoh et al., 2020; Tahir et al., 2021), serta pengembangan SDM pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan (Siwij et al., 2023). Artiari et al. (2025) membuktikan secara empiris bahwa tingkat engagement pada akun Instagram resmi pemerintah daerah Likupang berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan domestik, sehingga pemasaran digital harus menjadi prioritas dalam strategi pemulihan. Wikarsa et al. (2024) menunjukkan bahwa penetapan lokasi strategis bagi UMKM kuliner oleh pemerintah daerah Kota Tomohon merupakan bentuk intervensi spasial yang mendukung pemulihan ekonomi berbasis pariwisata pasca-pandemi. Namun, pemerintah daerah juga masih menghadapi kendala pada infrastruktur wisata dan pengelolaan destinasi yang memerlukan perhatian serius.

Pembangunan Infrastruktur sebagai Fondasi Pemulihan

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam strategi pemulihan pariwisata pasca-pandemi di Minahasa. Temuan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur wisata, termasuk akses jalan, fasilitas sanitasi, konektivitas internet, dan sarana pendukung lainnya, secara langsung mempengaruhi pengalaman wisatawan dan daya tarik destinasi. Pemerintah daerah perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengalaman wisatawan (Siwij et al., 2023), mengingat keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama yang dihadapi Kabupaten Minahasa dalam pengembangan pariwisata

(Patadjenu et al., 2023). Dukungan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan destinasi, dan tanpa alokasi yang memadai, pembangunan infrastruktur akan terhambat (Sumakul et al., 2021). Lintong (2022) dalam RIPPARKAB Minahasa Utara 2021–2025 telah merumuskan program infrastruktur pariwisata yang indikatif, mencakup pembangunan aksesibilitas, fasilitas wisata, dan sarana pendukung lainnya yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan.

Secara spesifik, strategi pemulihan pasca-pandemi perlu mencakup peningkatan fasilitas dasar yang layak, akses internet yang memadai untuk mendukung promosi digital, serta perbaikan jalan menuju lokasi wisata. Penguatan daya tarik destinasi menjadi bagian penting dari strategi daerah yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Dalam kasus Minahasa Utara, pengembangan kawasan Likupang sebagai destinasi super prioritas memerlukan peningkatan sarana prasarana yang signifikan untuk mengoptimalkan potensi destinasi (Patadjenu et al., 2023). Sarjono et al. (2023) juga mencatat bahwa pengembangan kawasan wisata di Pineleng menunjukkan perlunya investasi infrastruktur yang terencana sebagai bagian dari strategi defensif industri pariwisata pasca-pandemi. Wikarsa et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi strategis pengembangan UMKM pariwisata secara terencana dan berbasis data. Perbandingan antara rencana formal dalam RIPPARKAB dan kondisi implementasi lapangan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur pariwisata di Minahasa Utara.

Kebijakan dan Regulasi sebagai Kerangka Dukungan

Kebijakan dan regulasi yang tepat menjadi kerangka dukungan yang esensial bagi pemulihan pariwisata pasca-pandemi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata di Minahasa Utara membutuhkan koordinasi antarlembaga dan penataan program yang terstruktur (Sumakul et al., 2021). Pemerintah daerah perlu memperkuat monitoring dan evaluasi agar pengelolaan destinasi lebih efektif (Patadjenu et al., 2023), serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi sektor pariwisata. Sampeliling et al. (2024) menganalisis bahwa intervensi regulasi keuangan, termasuk kebijakan fiskal dan insentif, merupakan instrumen penting untuk mendorong pemulihan industri pariwisata di destinasi-destinasi populer Indonesia, yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah Minahasa untuk mendukung kelangsungan usaha pariwisata pasca-pandemi. Tangkere (2024) menekankan bahwa digitalisasi menjadi strategi kunci bagi daya saing kuliner Minahasa, dan kebijakan pemerintah daerah perlu mendukung transformasi digital ini untuk memperkuat keberlanjutan serta perluasan pasar pasca-pandemi. Regulasi keuangan yang tepat dapat memberikan stimulus bagi pelaku usaha dan mempercepat pemulihan sektor secara keseluruhan.

Inovasi kebijakan juga terlihat dalam pengembangan produk wisata baru di Minahasa. Sarjono et al. (2023) mendokumentasikan bagaimana kawasan wisata di Pineleng, Minahasa, mengembangkan strategi defensif dan adaptif selama pandemi, termasuk diversifikasi produk wisata sebagai respons terhadap perubahan permintaan pasar. Artiari et al. (2025) menunjukkan bahwa pemasaran digital melalui Instagram oleh pemerintah daerah Likupang terbukti meningkatkan

kunjungan domestik, yang mengindikasikan bahwa kebijakan promosi berbasis digital merupakan terobosan yang efektif dalam pemulihan pariwisata. Lintong (2022) merumuskan strategi dan program indikatif dalam RIPPARKAB yang mencakup pengembangan destinasi, pemasaran, dan penguatan kelembagaan sebagai kerangka kebijakan komprehensif untuk Minahasa Utara. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai inovator yang mampu menciptakan terobosan kebijakan untuk mendorong diversifikasi produk wisata dan mempercepat pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi.

Kolaborasi Penta-Helix dan Kemitraan

Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan merupakan strategi kunci dalam pengembangan pariwisata pasca-pandemi di Minahasa. Temuan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan aktor non-pemerintah (Patadjenu et al., 2023). Sari et al. (2022) menguraikan model kolaborasi penta-helix yang melibatkan lima elemen utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media, sebagai kerangka strategis untuk pengembangan desa wisata pasca-pandemi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama yang menyediakan regulasi, stimulus, protokol kesehatan, dan mendukung transformasi digital yang mendorong keberlanjutan desa wisata. Pendekatan penta-helix ini menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dibandingkan model kolaborasi konvensional karena melibatkan peran aktif media sebagai agen perubahan dan akademisi sebagai sumber inovasi.

Keterlibatan komunitas lokal dalam proses pengembangan wisata juga memperkuat keberlanjutan pengembangan wisata. Pemberdayaan masyarakat lokal mendukung keberlanjutan wisata dan ekonomi daerah, karena masyarakat yang terlibat aktif cenderung lebih menjaga dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya (Patadjenu et al., 2023). Implementasi kebijakan pariwisata di Minahasa Utara membutuhkan koordinasi antarlembaga dan penataan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Sumakul et al., 2021). Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan lembaga akademik menjadi prasyarat bagi pemulihan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan media digital oleh pemerintah desa untuk promosi wisata juga menjadi bentuk kolaborasi yang efektif di tingkat lokal (Newinera, 2024). Patadjenu et al. (2023) menekankan pentingnya pembagian tugas, legalitas institusional, dan mekanisme monitoring-evaluasi dalam tata kelola kolaboratif, yang dapat dijadikan kerangka kerja kolaborasi pemerintah-pemangku kepentingan di Minahasa. Wikarsa et al. (2024) menunjukkan bahwa penetapan hub bisnis oleh pemerintah daerah merupakan bentuk kolaborasi spasial-ekonomi yang mendukung pemulihan pariwisata di tingkat lokal.

Keberlanjutan dan Pelestarian Budaya

Keberlanjutan dan pelestarian budaya merupakan prinsip fundamental dalam pengembangan pariwisata pasca-pandemi di Minahasa. Temuan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal mendukung keberlanjutan wisata dan ekonomi daerah, sementara keterlibatan komunitas lokal memperkuat keberlanjutan pengembangan wisata (Patadjenu et al., 2023). Santika

et al. (2023) mengidentifikasi bahwa desa wisata pasca pandemi menghadapi berbagai masalah dan tantangan, termasuk rendahnya kapasitas komunitas, keterbatasan partisipasi lokal dalam perencanaan, dan lemahnya mekanisme keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata daerah harus diarahkan pada pemulihan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal dapat diminimalkan dan partisipasi masyarakat diperkuat.

Dalam konteks Minahasa, pelestarian budaya lokal seperti tradisi, upacara adat, dan situs-situs bersejarah menjadi daya tarik wisata yang unik dan tidak dapat digantikan. Sarjono et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata di Minahasa perlu mempertimbangkan aspek lokalitas budaya sebagai bagian integral dari strategi adaptif pasca-pandemi. Pengembangan pariwisata pasca-pandemi harus disertai peningkatan kapasitas SDM dan branding destinasi yang berbasis identitas budaya lokal. Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara juga menegaskan bahwa pengembangan wisata yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas (Dempo & Tulung, 2025). Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian dan promosi budaya lokal Minahasa ke tingkat nasional dan internasional. Penelitian tentang dampak pengembangan desa wisata terhadap kualitas hidup masyarakat menunjukkan bahwa pariwisata berbasis komunitas yang dikelola secara partisipatif mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi lokal (Wulandari et al., 2023). Santika et al. (2023) merekomendasikan agar strategi keberlanjutan desa wisata dirancang secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai fasilitator dan masyarakat lokal sebagai subjek pengembangan. Tangkere (2024) juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang mendukung digitalisasi usaha kuliner berperan penting dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan produk wisata lokal Minahasa.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Tema	Temuan Utama	Rujukan
Penggerak Utama	Pemerintah daerah berperan sentral dalam inisiasi, koordinasi, dan strategi defensif pemulihan pariwisata	Siwij et al., 2023; Sarjono et al., 2023
Infrastruktur	Keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala; RIPPARKAB dan pendekatan AHP mendukung perencanaan	Patadjenu et al., 2023; Sumakul et al., 2021; Lintong, 2022; Wikarsa et al., 2024
Kebijakan & Regulasi	Intervensi fiskal, digitalisasi, dan perencanaan induktif mendukung diversifikasi produk wisata	Sampeliling et al., 2024; Artiari et al., 2025; Lintong, 2022; Tangkere, 2024
Kolaborasi	Model penta-helix dan tata kelola kolaboratif mempercepat pemulihan destinasi	Sari et al., 2022; Patadjenu et al., 2023; Wikarsa et al., 2024
Keberlanjutan	Pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan dampak desa wisata terhadap kualitas hidup	Patadjenu et al., 2023; Santika et al., 2023; Wulandari et al., 2023; Tangkere, 2024

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran sentral dan multidimensi dalam mendukung pengembangan pariwisata di era pasca-pandemi di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Peran tersebut termanifestasi dalam lima dimensi utama yang saling terkait dan berkontribusi secara kolektif terhadap pemulihan sektor pariwisata. Pertama, pemerintah daerah berperan sebagai penggerak utama yang memiliki kewenangan untuk merancang, menginisiasi, dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata (Siwij et al., 2023; Sarjono et al., 2023). Kedua, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi pemulihan yang tidak dapat diabaikan, dengan RIPPARKAB sebagai kerangka perencanaan strategis (Patadjenu et al., 2023; Sumakul et al., 2021; Lintong, 2022).

Ketiga, kebijakan dan regulasi yang inovatif menjadi kerangka dukungan yang krusial. Intervensi regulasi keuangan yang dirumuskan Sampeliling et al. (2024) dapat diadaptasi pemerintah daerah Minahasa untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha pariwisata. Bukti empiris Artiari et al. (2025) tentang dampak pemasaran digital Instagram terhadap kunjungan domestik di Likupang menunjukkan bahwa kebijakan promosi berbasis digital merupakan instrumen pemulihan yang efektif. Keempat, kolaborasi penta-helix dan kemitraan menjadi strategi akselerasi yang efektif. Model penta-helix yang diuraikan Sari et al. (2022) dan tata kelola kolaboratif Likupang (Patadjenu et al., 2023) mempercepat pemulihan dan meningkatkan daya saing destinasi melalui pembagian peran yang jelas antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media.

Kelima, keberlanjutan dan pelestarian budaya harus menjadi prinsip yang melandasi seluruh upaya pengembangan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat lokal dan keterlibatan komunitas dalam proses pengembangan wisata memperkuat keberlanjutan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat di sekitar destinasi (Patadjenu et al., 2023; Dempo & Tulung, 2025). Santika et al. (2023) menegaskan bahwa pengembangan desa wisata pasca-pandemi memerlukan peningkatan kapasitas komunitas dan mekanisme partisipasi yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutan program. Wulandari et al. (2023) memberikan bukti bahwa pengembangan desa wisata berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga memperkuat argumen bahwa pariwisata berbasis komunitas harus menjadi prioritas dalam strategi pemulihan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, pemulihan pariwisata pasca-pandemi di Minahasa memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah daerah, investasi infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, digitalisasi pemasaran, intervensi regulasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tanpa sinergi ini, upaya pemulihan akan bersifat parsial dan tidak mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus berfungsi sebagai koordinator utama yang mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dan sumber daya untuk mencapai tujuan pemulihan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Disarankan agar pemerintah daerah menyusun roadmap pemulihan yang terintegrasi berdasarkan RIPPARKAB (Lintong, 2022), meningkatkan alokasi anggaran pariwisata, memperkuat promosi digital (Lontoh et al., 2020; Artiari et al., 2025; Tahir et al., 2021), melembagakan

mekanisme kolaborasi penta-helix (Sari et al., 2022), mengintensifkan pemberdayaan masyarakat lokal (Santika et al., 2023), serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi (Patadjenu et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Artiari, N., Nurmawati, E., & Sugiyarto, T. (2025). The impact of engagement rate on the number of domestic tourist trips: A case study of digital marketing through instagram in super priority destination, Likupang. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 19(1), 51–66. <https://doi.org/10.47608/jki.v19i12025.51-66>
- Dempo, M. N., & Tulung, M. R. (2025). Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan*, 7(2), 199–216. <https://doi.org/10.35791/agrirud.v7i2.62462>
- Lintong, O. (2022). RIPPARKAB Minahasa Utara 2021–2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6478100>
- Lontoh, J. K. A., Maramis, M. J. H., Tilaar, V. L., & Tulung, M. R. (2020). Pemanfaatan media sosial sebagai strategi promosi bagi pengembangan pemasaran wisata Danau Linow di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 8(4), 11–20.
- Newinera. (2024). Development of tourism promotion through new media by the village government in North Minahasa Regency. *Journal La Bisecoman*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v5i1.1023>
- Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi, A. (2023). Tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48>
- Sampeliling, A., Syaharuddin, Y., & Purwadi, P. (2024). Financial regulatory intervention in encouraging the tourism industry—Portrait of the top 5 popular destinations in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(6), 2089–2100. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190632>
- Santika, I. Z., Wibowo, A., & Lestari, E. (2023). Masalah dan tantangan desa wisata pasca pandemi Covid-19. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 6(2), 52–61. <https://doi.org/10.32528/sw.v6i2.470>
- Sari, Y. R., Handayani, D., Marta, A., Desiana, V., & Wiranata, I. J. (2022). Penta helix collaboration on village tourism development program in Indonesia post Covid-19 pandemic. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Vol. 617). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.004>
- Sarjono, H., Hartono, H., & Renato, R. (2023). Defensive strategy living and rising from industry tourist during time pandemic. *Ekuilibrium*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.46254/eu05.20220111>
- Siwij, D. S. R., Wawointana, T., Silalahi, J., Memah, H. F. V., & Tengker, L. (2023). Peran pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata di Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro*, 5(2), 55–61.

- Sumakul, Z. A., Suradinata, E., & Supriyadi, B. (2021). Kinerja dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
- Tahir, Y. D., Kiyai, B., & Dengo, S. (2021). Strategi promosi pariwisata bunga di Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(102), 1–78.
- Tangkere, T. (2024). Developing Minahasa culinary competitive strategy using information technology. *International Journal of Information and Technology Education*, 3(2), 65–75. <https://www.ijite.jredu.id/index.php/ijite/article/view/270>
- Wikarsa, L., Sumampouw, M., & Kalangi, P. (2024). Applying the Analytical Hierarchy Process to select strategic locations for culinary MSMEs in Tomohon City. <https://www.researchgate.net/publication/399714709>
- Wulandari, R., et al. (2023). The impact of tourism village development on quality of life. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 3–16. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-072-5_2